



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254);
18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan Gampong.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan penyaluran Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan koordinasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya;
6. Inspektorat adalah Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang mengawasi dan mengevaluasi tata kelola Gampong;
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong;
9. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Keuchik adalah pimpinan pemerintah gampong yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
11. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
15. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
19. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
21. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
22. Pengelola keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong tersebut;

23. Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan perangkat gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADG

Pasal 2

- (1) ADG merupakan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DAU dan DBH) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang memiliki Gampong dalam APBK 2025 tidak termasuk dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, dana bagi hasil sumberdaya alam reboisasi, dana bagi hasil sumberdaya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka dana otonomi khusus.
- (2) Besaran Alokasi ADG yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dalam APBK Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 59.874.796.700,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Aparatur Gampong yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Keuchik, Sekretaris Gampong, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- (4) Tuha Peut yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua dan Anggota Tuha Peut Gampong.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADG

Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong dialokasikan secara Proposional dan berkeadilan berdasarkan jumlah Aparatur Gampong dan Tuha Peut;
- (2) Perhitungan ADG setiap Gampong bagi Gampong-gampong yang tidak melakukan Pergantian Antar Waktu Keuchik Gampong dihitung dengan formula sebagai berikut:
$$\begin{aligned} \text{ADGx} &= \sum \text{PTKPG} + \sum \text{TOTPG} + \sum \text{BOTPG} \\ \text{ADGx} &= \text{Alokasi Dana Gampong setiap Gampong} \\ \sum \text{PTKPG} &= \text{Jumlah Penghasilan Tetap Aparatur Gampong dalam 1 tahun} \\ \sum \text{TOTPG} &= \text{Tunjangan Operasional Tuha Peut Gampong dalam 1 Tahun} \\ \sum \text{BOTPG} &= \text{Belanja Operasional Pemerintah Gampong dalam 1 Tahun} \end{aligned}$$

- (3) Daftar Rincian pembagian ADG bagi Gampong-Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dapat dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I dapat disalurkan paling lambat pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus;
 - b. tahap II dapat disalurkan paling lambat pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus;
 - c. tahap III dapat disalurkan paling lambat pada bulan September sebesar 25%(dua puluh lima perseratus;dan
 - d. tahap IV dapat disalurkan paling lambat pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus.
- (3) Syarat Penyaluran Dana dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. surat permohonan Penyaluran dari Keuchik kepada Camat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - c. Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD); dan
 - d. laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahap sebelumnya.
- (4) Atas dasar kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Camat, maka Camat menerbitkan surat permohonan penyaluran ADG kepada DPMGP4/BPKD dengan Melampirkan:
 - a. Asli surat Permohonan Camat Kepada DPMGP4 /BPKD; dan
 - b. laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahap sebelumnya.
- (5) Bupati Nagan Raya melalui DPMGP4/BPKD melakukan penyaluran dana ke Rekening Kas Gampong sebagaimana diatur pada ayat (2).

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (4) Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG dilakukan dengan ketentuan:

- a. Keuchik wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADG tahun sebelumnya paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
- b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG pada setiap tahap penyaluran dana yang telah digunakan; dan
- c. Keuchik menyampaikan laporan realisasi tahunan penggunaan ADG tahap I, II, III dan IV kepada Bupati Nagan Raya Cq. DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran ADG dan dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan telah disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADG dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (4) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.
- (5) Pengurangan ADG dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan pengelolaan Dana Anggaran Gampong.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kecamatan dan kabupaten.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADG.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi Dana ADG dilaporkan kepada Bupati secara pertahapan pencairan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana ADG dilakukan oleh Tuha Peut dan camat.
- (2) Aparat pengawasan fungsional daerah sewaktu waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan Dana ADG dan PDRD atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana ADG atas sepengetahuan Bupati.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 11

Verifikasi atas Dokumen Dana ADG dilakukan oleh Sekretaris Gampong.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADG harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADG berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan persetujuan Bupati Nagan Raya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

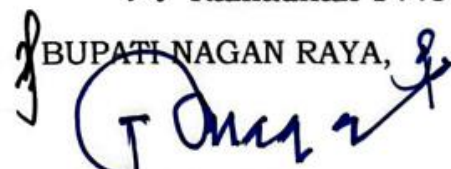
Pada saat Peraturan Bupati Nagan Raya ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 506), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

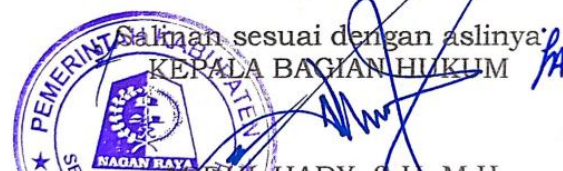
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 25 Maret 2025 M
25 Ramadhan 1446 H


BUPATI NAGAN RAYA,
T.R. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 25 Maret 2025 M
25 Ramadhan 1446 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ARDIMARTHA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H., M.H.
NIP. 19700913 199010 1 001


PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEC		GAMPONG	PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA										TUHA PEUT		OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG						Operasional Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemerintah Gampong	Jumlah Operasional Pemerintah Gampong	JUMLAH ADG	
				KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI				
				JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN												
																									2,576,640
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	KUALA	1	LAWA BATU	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	303,419,680
2		2	JOGJA	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	317,819,680
3		3	UJONG SIKUNENG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
4		4	BLANG MUKO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	5	87,000,000	254,719,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	335,219,680
5		5	PULO IE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
6		6	PURWOREJO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
7		7	BLANG BARO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
8		8	ALUE IE MAMEH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	5	87,000,000	254,719,680	7	51,600,000	-	-	-	-	15,195,740	-	-	15,195,740	321,515,420
9		9	UJONG PASI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	298,619,680
10		10	SIMPANG PEUT	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	6	104,400,000	272,119,680	9	66,000,000	-	-	-	-	15,195,740	-	-	15,195,740	353,315,420
11		11	BLANG TEUNGOH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	7	51,600,000	-	-	-	-	15,195,740	-	-	15,195,740	286,715,420
12		12	UJONG PADANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	317,819,680
13		13	COT KUMBANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	286,019,680
14		14	BLANG BINTANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	298,619,680
15		15	UJONG PATIHAAH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	8	139,200,000	306,919,680	9	66,000,000	-	-	-	-	15,195,740	12,500,000	27,695,740	400,615,420	
16		16	KUTA MAKMUE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	298,619,680
17		17	GUNONG REUBO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
18	SEUNAGAN	1	JEURAM	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	286,019,680
19		2	PANTE CEUREUMEN	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680	
20		3	KUTA BARO JEURAM	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	281,219,680
21		4	PAROM	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	266,819,680
22		5	PEUREULAK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
23		6	KUTA SAYEH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	12,500,000	27,000,000	264,919,680	
24		7	BLANG BARO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	266,819,680
25		8	PADANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	266,819,680
26		9	ALUE THO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	284,219,680
27		10	LHOK PAROM	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
28		11	SAPEK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	266,819,680
29		12	ALUE DODOK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
30		13	COT KUMBANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
31		14	KUTA KUMBANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
32		15	NIGAN	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	281,219,680
33		16	GAMPONG COT	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
34		17	BLANG PATEUK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
35		18	BLANG PUUK NIGAN	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
36		19	KRUENG CEH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
37		20	BANTAN	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
38		21	COT LHE LHE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	252,419,680
39		22	RAMBONG RAYEUK	1																					

NO	KEC		GAMPONG	PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA										TUHA PEUT		OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG						Operasional Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemerintah Gampong	Jumlah Operasional Pemerintah Gampong	JUMLAH ADG
				KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI			
				JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN		KETUA	700,000	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)			
					2,576,640		1,800,000		1,600,000		1,600,000		1,450,000		ANGGOT A	600,000	-	14,500,008	14,500,000	14,500,000	15,195,740			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
50		33	BLANG MURONG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	266,819,680
51		34	KULU	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	266,819,680
52	SEUNAGAN TIMUR	35	RAMBONG CUT	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
53		1	BLANG PANYANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	266,819,680
54		2	MEUGAT MEH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
55		3	LHOK PANGE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000
56		4	BLANG LANGO	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	233,219,688
57		5	TUWI MEULEUSONG	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	2	34,800,000	164,119,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	215,819,688
58		6	BLANG GEUDONG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
59		7	BLANG TEUNGKU	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	233,219,680
60		8	SAWANG MANE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
61		9	KEUDE NEULOP	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
62		10	KILA	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	233,219,688
63		11	KANDEH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
64		12	COT GUD	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	286,019,680
65		13	KABU BAROH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
66		14	KABU TUNONG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	266,819,680
67		15	KEUDE LINTEUNG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	266,819,680
68		16	MEURANDEH SUAK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
69		17	UTEUN PULO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	12,500,000	27,000,000	311,119,680
70		18	COT MANYANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
71		19	PULO TEUNGGOH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
72		20	COT DIRUI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	2	34,800,000	183,319,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	235,019,680
73		21	COT TEUKU DEK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	2	34,800,000	183,319,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	235,019,680
74		22	SAPENG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
75		23	PEULEUKUNG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	252,419,680
76		24	PAYA	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	252,419,680
77		25	BLANG PREH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	2	34,800,000	183,319,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	12,500,000	27,000,000	247,519,680
78		26	BLANG ARA KEUDE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	266,819,680
79		27	BLANG ARA GAMPONG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	12,500,000	27,000,000	264,919,680
80		28	IE BEUDOH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	266,819,680
81		29	BLANG BAYU	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	266,819,680
82		30	MON BATEUNG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
83		31	SUAK PEUREUBONG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
84		32	KRUENG KULU	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
85		33	COT PUNTI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	2	34,800,000	202,519,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-			

NO	KEC		GAMPONG	PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA										TUHA PEUT		OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG						Operasional Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemerintah Gampong	Jumlah Operasional Pemerintah Gampong	JUMLAH ADG
				KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI			
				JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN		KETUA	700,000	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)			
					2,576,640		1,800,000		1,600,000		1,600,000		1,450,000		ANGGOT A	600,000	-	14,500,008	14,500,000	14,500,000	14,500,000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103		17	KEUDE SEUMOT	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	317,819,680
104		18	BLANG BARO RAMBONG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	6	104,400,000	252,919,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	333,419,680
105		19	UJONG BLANG	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	233,219,680
106		20	MEUNASAH KRUENG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
107		21	MEUNASAH DAYAH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	284,219,680
108		22	MEUNASAH TEUNGOH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	298,619,680
109		23	KULAM JERNEH	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	4	69,600,000	198,919,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	265,019,680
110	DARUL MAKMUR	24	BUMI SARI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
111		1	LAMIE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	5	87,000,000	235,519,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	316,019,680
112		2	KUTA TRIENG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	298,619,680
113		3	GELANGGANG GAJAH	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	233,219,680
114		4	KAYEE UNOE	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	2	34,800,000	164,119,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	215,819,688
115		5	BLANG BARO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
116		6	ALUE BILJE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	317,819,680
117		7	SUKA RAJA	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	266,819,680
118		8	GUNONG CUT	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	298,619,680
119		9	SUKA JADI	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	233,219,688
120		10	TUWI BUYA	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	233,219,688
121		11	UJONG LAMIE	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	9	66,000,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	262,019,688
122		12	SUAK PALEMBANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
123		13	ALUE WAKI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	6	104,400,000	252,919,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	333,419,680
124		14	ALUE GEUTAH	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	4	69,600,000	198,919,680	7	51,600,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	265,019,688
125		15	KRUENG ALEM	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	6	104,400,000	252,919,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	333,419,680
126		16	ALUE RAMBOT	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	262,019,680
127		17	KRUENG SEUMANYAM	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	5	87,000,000	235,519,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	316,019,680
128		18	PULO TEUNGOH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	298,619,680
129		19	KARANG ANYER	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	6	104,400,000	252,919,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	333,419,680
130		20	KUALA SEUMANYAM	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	233,219,688
131		21	PULO IE	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	247,619,680
132		22	PULO KRUET	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	2	34,800,000	164,119,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	215,819,688
133		23	ALUE KUYUN	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	2	34,800,000	164,119,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	215,819,688
134		24	ALUE RAYA	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	7	121,800,000	251,119,680	9	66,000,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	331,619,680
135		25	ALUE JAMPAK	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	4	69,600,000	198,919,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	250,619,688
136		26	SUKA MULJA	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	7	51,600,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	284,219,680
137		27	SIMPANG DUA	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
138		28	SIDO JADI	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	4	69,600,000	198,919,680										

NO	KEC		GAMPONG	PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA										TUHA PEUT		OPERASIONAL PEMERINTAH GAMPONG						Operasional Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemerintah Gampong	Jumlah Operasional Pemerintah Gampong	JUMLAH ADG
				KEUCHIK		SEKDES		KASI		KAUR		KADUS		JUMLAH	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI			
				JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN	JUMLAH (ORANG)	1 TAHUN		KETUA	700,000	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)	1 TAHUN (Rp)			
					2,576,640		1,800,000		1,600,000		1,600,000		1,450,000		ANGGOT A	600,000	-	14,500,008	14,500,000	14,500,000	15,195,740			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
149		39	SUMBER MAKMUR	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	2	34,800,000	164,119,680	5	37,200,000	-	14,500,008	-	-	-	12,500,000	27,000,008	228,319,688
150	SUKA MAKMUE	40	MAKARTI JAYA	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	2	34,800,000	164,119,680	7	51,600,000	-	14,500,008	-	-	-	-	14,500,008	230,219,688
151		1	LUENG BARO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	5	87,000,000	254,719,680	9	66,000,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	335,915,420
152		2	ALUE KAMBUK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	253,115,420
153		3	KUTA PADANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	267,515,420
154		4	SUAK BILIE	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	4	69,600,000	218,119,680	9	66,000,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	299,315,420
155		5	MACAH	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	3	52,200,000	181,519,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	233,219,680
156		6	SEUMAMBEK	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	2	34,800,000	164,119,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	215,819,680
157		7	COT KUTA	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	7	51,600,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	304,115,420
158		8	KABU BLANG SAPEK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	267,515,420
159		9	COT PEURADI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	267,515,420
160		10	BLANG SAPEK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	7	51,600,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	304,115,420
161		11	LHOK BEUTONG	1	30,919,680	1	21,600,000	2	38,400,000	2	38,400,000	2	34,800,000	164,119,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	215,819,680
162		12	GAMPONG TEUNGOH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	2	34,800,000	183,319,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	235,019,680
163		13	LHOK RAMEUAN	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	2	34,800,000	183,319,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	235,019,680
164		14	BLANG MULING	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	252,419,680
165		15	KRAK TAMPAI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	266,819,680
166	KUALA PESISIR	16	MEUREUBO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	253,115,420
167		17	KUTA BARO BLANG MULING	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	252,419,680
168		18	ALUE PEUSAJA	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	2	34,800,000	183,319,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	235,019,680
169		19	ALUE GAJAH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	2	34,800,000	183,319,680	5	37,200,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	235,715,420
170		1	SUAK PUNTONG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	303,419,680
171		2	GAMPONG LHOK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	271,619,680
172		3	KUALA BARO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	286,019,680
173		4	PADANG RUBEK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	9	66,000,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	318,515,420
174	TADU RAYA	5	PULO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	14,500,000	-	-	-	14,500,000	252,419,680
175		6	LANGKAK	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	9	66,000,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	318,515,420
176		7	KUALA TUHA	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	286,019,680
177		8	KUBANG GAJAH	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	300,419,680
178		9	KUALA TRANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	6	104,400,000	272,119,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	352,619,680
179		10	COT RAMBONG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	2	38,400,000	3	52,200,000	200,719,680	5	37,200,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	252,419,680
180		11	PADANG PANYANG	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	9	66,000,000	-	-	-	-	15,195,740	-	15,195,740	318,515,420
181		12	ARONGAN	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	4	69,600,000	237,319,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	303,419,680
182		13	JATI REJO	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	286,019,680
183		14	PURWODADI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	5	87,000,000	254,719,680	9	66,000,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	335,219,680
184		15	LEUNG TEUKU BEN	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,680	7	51,600,000	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000	286,019,680
185		16	PURWOSARI	1	30,919,680	1	21,600,000	3	57,600,000	3	57,600,000	3	52,200,000	219,919,68										

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
GAMPONG (ADG) TAHUN ANGGARAN 2025

A. Pendahuluan
Alokasi Dana Gampong adalah bentuk kontribusi Kabupaten dalam mengalokasikan dana sharing kepada yang bertujuan untuk menjadi arah kebijakan Pengelolaan dan Penggunaan ADG Tahun 2025 bagi menunjang kebutuhan operasional Gampong dan percepatan pemulihan ekonomi Gampong untuk pencapaian target Program Dana Desa, SDGsDesa, RPK, RPA dan RPJM Nasional.

A. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah (BHPRD) Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Kabupaten dapat digunakan untuk:

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) diperuntukkan hanya pada Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong:

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Keuchik	Orang/Bulan	2.576.240,-	
2.	Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	1.800.000,-	
3.	Kasie	Orang/Bulan	1.600.000,-	
4.	Kaur	Orang/Bulan	1.600.000,-	
5.	Kadus	Orang/Bulan	1.450.000,-	

2. Penguatan Peran dan tugas khusus TP-PKK sebagai leading sektor untuk mengkoodinir penurunan stunting ke arah zero stunting di gampong pada tahun 2025. dapat di berikan insentif sebesar:

- 1) Ketua TPPKK sebesar Rp. 200.000,-/ bulan
- 2) Sekretaris sebesar Rp. 150.000,-/ bulan
- 3) Ketua Pokja sebesar Rp. 125.000,-/ bulan

B. Belanja Tunjangan Kedudukan Tuha Peut :
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Lembaga Tuha Peut dapat diberikan insentif sebagai berikut:

No	Struktur Tuha Peut	Satuan	Jumlah(Rp)	Ket
1.	Ketua	Orang/Bulan	700.000,-	
2.	Anggota	Orang/Bulan	600.000,-	

Ketentuan khusus:

- 1) Tuha Peut Gampong wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap Triwulan;
- 2) Laporan kegiatan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat serta disampaikan kepada Keuchik dan Forum Musyawarah Gampong secara tertulis dan atau lisan.
- 3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran tunjangan kedudukan Tuha Peut Gampong dan;
- 4) Laporan kegiatan Triwulan tersebut menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan Tuha Peut Gampong yang disampaikan kepada Bupati Nagan Raya melalui Camat.

C. Pelaksanaan tugas dan fungsi paranata sosial keagamaan berikut dapat di berikan insentif sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran masing-masing gampong seperti:

1. Imum Chik
2. Teungku Meunasah
3. Teungku Khatib
4. Teungku Bilal
5. Khadam Mesjid
6. Pentahjiz Mayat

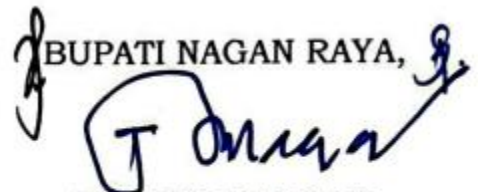
D. Biaya Operasional pemerintah Gampong sebesar :

- Desa Mandiri Rp 15.195.740,-
- Desa Maju Rp. 14.500.000,-
- Desa Berkembang Rp. 14.500.000,-
- Desa Tertinggal Rp. 14.500.008,-
- Desa Sangat Tertinggal Rp. 14.000.000,-

Biaya dimaksud dapat di anggarkan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah gampong seperti :

- a) Biaya rutin kantor (tagihan listrik kantor, ATK, cetak dan penggandaan, publikasi, perjalanan dinas) dan kegiatan rutin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Biaya iuran premi Asuransi Ketenaga kerjaan maksimal 40 orang @ 162.000,- /pertahun, di prioritaskan bagi :
 - Keuchik
 - Aparatur Gampong
 - Tuha Peut Gampong
 - Pengurus Keagamaan
 - Guru TPA
 - Guru PAUD
 - Ketua PKK
 - Kader Posyandu
 - Keujruen Blang/Panglima Laot
 - Petugas Linmas
 - Ketua Pemuda
 - Ketua LPMG
 - Kader Pembangunan Manusia (KPM)

- E. Operasional Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemerintah Gampong.
Biaya Operasional Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemerintah Gampong sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk memenuhi Kebutuhan Kelengkapan Operasional Kegiatan Pergantian Antar Waktu Pemerintah Gampong (PAW).
- F. Pemanfaatan dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) digunakan untuk kegiatan :
1. Bidang Pemerintahan Gampong;
 2. Bidang Pembangunan Gampong;
 3. Bidang Pembinaan Gampong; dan
 4. Bidang Pemberdayaan Gampong dapat digunakan :
 - (1) Penyertaan Modal Gampong pada BUMG yang sudah berbadan hukum; dan
 - (2) Kegiatan ekonomi produktif lainnya.


BUPATI NAGAN RAYA,
T.R. KEUMANGAN